

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TEGAL

Oleh:

Indah Fitriani, Herbasuki Nurcahyanto

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos.
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem of garbage in Tegal caused by inadequate waste management are also difficulties in obtaining land Landfill (TPA) and the technical operation of waste facilities and infrastructure are inadequate. Based on these issues, the Government of Tegal implement one program from the Department of Housing and Urban Spatial Tegal in waste management is a development program of performance management of waste derived from the vision and mission Diskimtaru, to measure the success of the program is carried out using a logical framework approach project (KKLP) which includes the evaluation indicators(inputs,outputs, outcomes, benefits, impact) and using theoretical models Korten conformity of the program. This study used quantitative research methods. The results showed that the performance of waste management development program got a score of 71% performance which shows that the performance of waste management development program included a category quite successful. Not to the success of the program due to an inhibiting factor in the development of the program of waste management's performance, so one suggestion to conduct the program in the performance of waste management is completeness of infrastructures and facilities in every place integrated waste management (TPST)

Kata Kunci : *Program Evaluation, Resource, Partisipation*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sampah merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pemukiman serta keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir menjadikan masalah sampah sebagai salah satu masalah yang harus segera diselesaikan. Sampah yang dibuang begitu saja tanpa ada perhatian khusus akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

Ancaman sampah menyebabkan kekhawatiran tentang lingkungan, yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan terutama produsen. Perlu dilakukan sistem manajemen lingkungan yang bertujuan untuk memecahkan atau mencegah masalah sampah dari lingkungan alam, dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan sampah yang dihadapi oleh kota – kota besar juga dialami di wilayah kota Tegal yang merupakan Kota padat penduduk. Berdasarkan data yang tercatat di BPS tiga tahun terakhir, penumpukan sampah di kota Tegal dalam dua tahun terakhir meningkat hingga 38,9%¹.

Bersamaan dengan kenaikan jumlah penduduk suatu kota, pola hidup penduduk kota juga semakin konsumtif sehingga menghasilkan limbah yang lebih banyak dari sebelumnya dan akhirnya permasalahan sampah meningkat. Meningkatnya permasalahan sampah akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang diringi dengan penanganan sampah yang belum memadai juga kesulitan mendapat lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan teknis pengoperasian sarana prasarana persampahan yang juga kurang memadai.

Menghadapi hal tersebut, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal menyusun strategi yang tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Dinas Pemukiman dan Tata Ruang yaitu “Terwujudnya Kota Tegal yang bersih dan indah dengan pemukiman yang nyaman dalam penataan

ruang yang berkelanjutan berbasis pelayanan prima”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui lima misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pertamanan.
3. Meningkatkan kualitas permukiman dengan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penataan ruang melalui perencanaan dan pengendalian yang prima.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang kota Tegal memiliki Strategi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan taman dan persampahan
2. Mengembangkan jangkauan pelayanan pengelolaan persampahan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan persampahan.

Sesuai strategi kedua, mengembangkan jangkauan pelayanan pengelolaan persampahan terdapat program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, program tersebut dijabarkan dengan kegiatan – kegiatan yaitu :

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
3. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan.

Pengelolaan persampahan yang dilakukan di kota Tegal harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai, sehingga sampah bisa terolah dan sampah dapat dihabiskan per harinya. Penyediaan prasarana dan sarana yang belum memenuhi semua TPST yang ada di Kota Tegal

¹ Renstra Diskimtaru Kota Tegal tahun 2014-2019

menyebabkan menyebabkan diciptakannya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan oleh Diskimtaru.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di kota Tegal kurang berhasil karena banyak Sampah yang tidak tertangani di TPST dikirim ke UPTD Muarareja yang memiliki alat *incenerator* berkualitas lebih baik dari TPST, namun kenyataannya UPTD Muarareja masih kerepotan dalam menangani sisa sampah yang tidak tertangani, karena di UPTD Muarareja terjadi penumpukan sampah yang disebabkan mesin *incenarator* hanya terdiri dari satu buah.

Gambar 1
Penumpukan Sampah di UPTD Muarareja



Berhasil tidaknya suatu program dalam penelitian ini dilihat melalui indikator evaluasi yaitu *input, output, outcome benefit dan impact*. Semua indikator di atas merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan program yang berjalan sesuai harapan, dapat diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota Tegal.

Dalam memulai pelaksanaan program selalu ada *input* yang menjadi sumber berjalannya sebuah program. Dana merupakan salah satu input dari Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah. Dana yang digunakan untuk mengelola sampah belum dikhususkan dalam APBD sehingga menimbulkan kesulitan sendiri bagi pengelola sampah.

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan menargetkan keluaran (*output*) yaitu tersedianya sarana dan prasarana persampahan, namun pada kenyataannya sarana prasarana yang ada di tiap TPST kota

Tegal masih kurang untuk pengelolaan sampah, ditambah lagi dengan bertambahnya TPST baru berarti sarana dan prasarana yang dibutuhkan bertambah.

Capaian *outcome* kegiatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan yaitu tersedianya TPST – TPST baru yang dapat digunakan untuk mengganti ketiadaan TPA, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang tidak tertangani di tiap Kecamatan yang ada di kota Tegal yaitu, dari 300 m³ berkurang menjadi 134 m³ yang belum tertangani, namun sisa sampah dari TPST – TPST yang masuk ke UPTD Muarareja semakin hari menyebabkan timbunan sampah yang semakin tinggi.

Capaian indikator manfaat program, dapat mengantisipasi ketiadaan TPA yang masa sewanya sudah berakhir Oktober 2015. Sampai bulan April 2016 dipastikan TPST menjadi tumpuan dalam pengelolaan sampah di Kota ini, namun keberadaan sejumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di kelurahan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dari 15 TPST yang ada saat ini baru ada tujuh *incenerator*, satu di antaranya belum bisa dioperasikan di TPST Sumurpanggung, Kecamatan Margadana. Sedangkan untuk kemampuan membakar, TPST Kalinyamat Wetan membutuhkan waktu empat hari untuk membakar tiga dump truck sampah. (Radar Semarang 20/02/2016)

Atas dasar permasalahan di atas maka perlu adanya kajian tentang “Evaluasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah di kota Tegal”.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengevaluasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal .
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Tegal.

C. KAJIAN TEORI

C. 1. EVALUASI PROGRAM

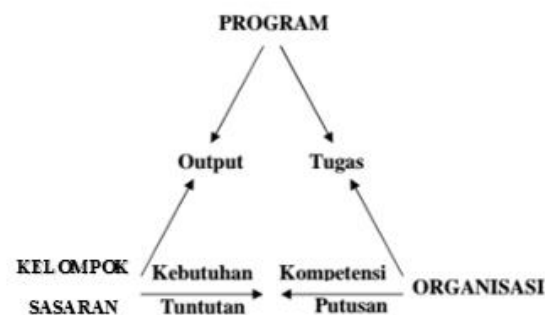
Definisi yang dituliskan dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* dalam buku evaluasi program pendidikan (2014:1) evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata – kata yang terkandung di dalam definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati – hati, bertanggungjawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama.

Daniel L. Stufflebeam dan Antony Shinkfield (dalam Wirawan 2011:30) mendefinisikan teori evaluasi program adalah *A program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principle forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation*. Menurut mereka teori evaluasi program mempunyai enam ciri, yaitu: pertalian menyeluruh; konsep – konsep inti; hipotesis – hipotesis teruji mengenai bagaimana prosedur – prosedur evaluasi yang menghasilkan keluaran yang diharapkan; prosedur – prosedur yang dapat diterapkan, persyaratan – persyaratan etikal; dan kerangka umum untuk mengarahkan praktik evaluasi program dan melaksanakan penelitian mengenai evaluasi program.

Salah satu model pelaksanaan program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian pelaksanaan program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Model Kesesuaian Pelaksanaan Program



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur pelaksanaan program. *Pertama*, kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur pelaksanaan kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas *output*-nya tidak dapat dimanfaatkan, jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat, jika syarat

yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Berdasarkan itu, kesesuaian antara tiga unsur pelaksanaan kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Berdasarkan teori Korten, jika dikaitkan dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di kota Tegal yaitu ketika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan, seperti dalam halnya Diskimtaru yang menyediakan mobil penyapu jalan padahal yang dibutuhkan adalah *incenerator* untuk dapat mengelola sampah secara maksimal. Belum terjadi kesesuaian antara unsur pelaksana program dengan kelompok sasaran sehingga kelompok sasaran tidak mendapat *output* program yang sesuai.

C.2 Kerangka Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja proyek merupakan bagian dari kegiatan perencanaan dan manajemen proyek yang secara sistematis terarah pada usaha mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari proyek – proyek yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran proyek – proyek tersebut. Evaluasi mencakup hal – hal yang lebih menyeluruh dan lebih menekankan pada umpan balik (*feedback*) terhadap hasil, manfaat dan dampak yang diperoleh dari proyek.

Adapun pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan melalui dua cara yaitu, penyusunan indikator dan sasaran kinerja serta pelaksanaan studi evaluasi kinerja. Tanpa pengembangan indikator – indikator kinerja, studi evaluasi kinerja program yang dilakukan oleh suatu lembaga akan sulit dilakukan. Fungsi evaluasi kinerja ada dua, *pertama* adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. *Kedua* adalah untuk memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

C.3 Indikator Evaluasi dan Sasaran Kinerja

Evaluasi kinerja proyek dilaksanakan dengan cara menggunakan indikator – indikator kinerja dan sasaran kinerja yang sudah disepakati bersama. Indikator dan sasaran kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*results*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan terhadap indikator dan sasaran kinerja proyek yang kita susun dapat ditempuh dengan pendekatan “kerangka kerja logis” (*logical framework*) yang mencakup indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pendekatan kerangka logis proyek dalam perencanaan proyek/kegiatan dianggap penting untuk mengetahui secara rinci tujuan proyek/kegiatan secara mikro maupun makro. Kerangka logis proyek dibuat satu atau beberapa halaman dan secara singkat pada waktu proyek/kegiatan direncanakan, dan kemudian disertakan dalam dokumen usulan proyek pada halaman pertama. Pada tahap manajemen pelaksanaan dan evaluasi (*ex – post evaluation*) proyek, kerangka logis ini dapat digunakan sebagai pegangan dalam menilai perencanaan (sebelum proyek/kegiatan dimulai) dan keberhasilan pelaksanaan proyek (pada waktu investasi dilaksanakan dan pada waktu proyek selesai). Secara ringkasnya, kerangka logis proyek dapat dipakai untuk menilai proyek pada setiap tahap, yaitu penilaian (*ex – ante = appraisal*), pelaksanaan (*on – going evaluation*) dan tahap selesainya proyek/kegiatan (*ex – post evaluation*). Pembuatan *logical framework* harus mencakup beberapa elemen, yaitu :Menentukan *inputs, outputs, results, benefits, dan impacts* dalam suatu indikator; Hubungan kausal (*means-end*) antara indikator – indikator tersebut; Asumsi – asumsi yang mengikuti tujuan disetiap tingkatan, yang merupakan faktor luar (*eksternal*) yang tidak dapat dikontrol oleh proyek yang dapat mempengaruhi hubungan antara *inputs, outputs, results, benefits, dan impacts*; dan menentukan indikator yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian setiap tujuan.

Indikator kinerja yang disusun harus sudah diidentifikasi sumber daya apa yang tersedia untuk menghasilkan keluaran. Indikator kinerja keluaran lebih terkait dengan hasil fisik

maupun jasa yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan proyek, untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan program perlu disusun indikator hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan proyek pada jangka pendek maupun jangka menengah (efek langsung), kemudian indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan proyek, yaitu indikator manfaat dan dampak. Mengingat program/kegiatan/ proyek sangat beragam, dan dapat bersifat fisik maupun non fisik, maka indikator kinerja juga pengukurannya tidak selalu sama. Terdapat 5 (lima) macam indikator kinerja yang umumnya digunakan yakni:

1. Indikator kinerja *input* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan; misalnya dana, SDM, informasi,
2. Indikator kinerja *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator kinerja *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan jangka menengah (Efek langsung).
4. Indikator kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksana kegiatan.
5. Indikator kinerja dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan digunakan teknik pengambilan sampel *stratified proportional random sampling*, yaitu cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) didalam populasi. Informan penelitian ini adalah Kepala bidang persampahan,

Indikator	Keg 1 %	Keg 2 %	Keg 3 %
<i>Input</i>	98,5	99	80
<i>Output</i>	100	100	50
<i>Outcome</i>	85	80	50
<i>Benefit</i>	80	40	64
<i>Impact</i>	42	80	18,5
Kinerja (%)	81	80	52
Total rata – rata kinerja	71%		

Keterangan:

Keg 1 = Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kota Tegal.
Keg 2 = Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di Kota Tegal.
Keg 3 = Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan.

Kepala seksi persampah, ketua TPST dan masyarakat. Dalam *stratified* data sebelumnya dikelompokkan kedalam tingkatan – tingkatan tertentu, seperti: tingkatan tinggi, sedang/baik dan rendah. Dalam penelitian ini kelompok strata berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) di kecamatan kota Tegal,yaitu diambil dari jumlah KK yang paling sedikit. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penelitian adalah sulitnya bertemu dengan narasumber.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Evaluasi Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa kegiatan *pertama* yaitu penyediaan prasarana dan sarana yang mendapat nilai kinerja sebesar 81 %, nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan berhasil dengan indikator *input* (masukan) menunjukkan nilai capaian kinerja sebanyak 98,5%. Indikator *input* (masukan) dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ini sangat memadai dan sangat efektif. Indikator *output* (keluaran) dari kegiatan ini sesuai dan efektif. Indikator *outcome* (hasil) kegiatan ini menunjukkan hasil yang baik dan efektif dengan skor 85%, sedangkan indikator *benefit* (manfaat) menunjukkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana ini memberikan manfaat yang baik dan efektif dengan skor 80%, namun pada indikator *impact* (dampak) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana ini memberikan dampak yang sangat kecil dan kurang efektif dengan skor 42%.

Kegiatan *kedua* yaitu peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang mendapat nilai kinerja sebesar 75%, nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan cukup berhasil

dengan indikator *input* (masukan) menunjukkan nilai capaian kinerja sebanyak 99%. Indikator *input* (masukan) dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ini sangat memadai dan sangat efektif. Indikator *output* (keluaran) dari kegiatan ini sesuai dan efektif. Indikator *outcome* (hasil) kegiatan ini menunjukkan hasil yang baik dan efektif dengan skor 80%, sedangkan indikator *benefit* (manfaat) menunjukkan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana ini memberikan manfaat yang belum baik dan belum efektif dengan skor 40%, namun pada indikator *impact* (dampak) kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana ini memberikan dampak yang baik dan efektif dengan skor 80%.

Kegiatan *ketiga* yaitu pengembangan teknologi persampahan yang mendapat nilai kinerja 52%, dari tiga kegiatan di program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal kegiatan pengembangan teknologi persampahan mendapatkan penilaian kinerja paling rendah yaitu 52% nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan kurang berhasil dengan indikator *input* (masukan) sangat memadai dan sangat efektif. Indikator *output* (keluaran) dari kegiatan ini belum sesuai dan efektif. Indikator *outcome* (hasil) kegiatan ini menunjukkan hasil yang belum baik dan belum efektif dengan skor 50%, sedangkan indikator *benefit* (manfaat) menunjukkan kegiatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan ini memberikan manfaat yang belum baik dan belum efektif dengan skor 50%, dan pada indikator *impact* (dampak) kegiatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan ini memberikan dampak yang sangat kecil dan kurang efektif dengan skor 18,5%.

Dapat disimpulkan untuk capaian presentase program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal yaitu 71 % yang berarti program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dinilai cukup berhasil. Presentase yang paling rendah adalah pada indikator *impact* yang berarti dampak dari program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan belum mempengaruhi masyarakat yang ada di Kota Tegal dalam mengelola sampah sehari – hari.

Kurang berhasilnya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal diukur dari realisasi kegiatan dengan menggunakan dana dan waktu (*input*), *output*, *outcome*, *benefit* yang sesuai direncanakan namun memberikan *impact* yang sangat kecil dan kurang efektif dalam mewujudkan dampak yang direncanakan. Permasalahan yang ditemui pada TPST - TPST adalah sebagian TPST tidak memiliki prasarana dan sarana yang lengkap untuk mengelola sampah sehingga dalam pengelolaan sampah hanya menggunakan prasarana dan sarana seadanya, padahal prasarana dan sarana adalah faktor penting dalam pengelolaan sampah namun prasarana dan sarana yang disediakan oleh Diskintaru tidak mencakup semua TPST yang ada di Kota Tegal. Prasarana dan sarana yang tidak lengkap di setiap TPST, sehingga belum dapat memberikan dampak yang berarti dalam menurunkan jumlah timbunan sampah yang sudah menggunung di UPTD Muarareja.

Incenerator dengan jumlah terbatas dan tidak memenuhi persyaratan ideal membuat masalah baru dalam pengelolaan sampah yaitu tidak dapat menghabiskan sampah yang masuk ke TPST sehingga menambah jumlah timbunan sampah yang ada. Kapasitas sampah yang bisa dibakar tak sebanding dengan jumlah sampah yang masuk ke TPST setiap hari sehingga sampah yang tidak dapat dihabiskan dikirim ke UPTD Muarareja dan mengakibatkan timbunan yang lebih banyak. (www.koran-sindo.com)

Permasalahan yang sangat krusial adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tegal, karena pada dasarnya pengelolaan sampah akan berhasil jika pelaksana program dan masyarakat saling bekerjasama mewujudkan tujuan dan sasaran program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal, namun dalam hal ini kesadaran masyarakat di Kota Tegal sangat kecil sehingga program belum dapat berjalan sesuai harapan. Contoh kecilnya adalah masyarakat yang membuang sampah di depan TPST, yang seharusnya sampah dibuang ke dalam TPST.

Dilihat dari permasalahan – permasalahan yang terjadi jika dikaitkan dengan

teori Korten model kesesuaian pelaksanaan program ditemukan ketidak sesuaian antara tiga unsur pelaksanaan program. Pertama dari teori Korten menjelaskan kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat), dalam hal ini TPST membutuhkan prasarana dan sarana yang lengkap namun Dinas belum dapat memenuhi kelengkapan prasarana dan sarana setiap TPST.

Berdasarkan teori kedua yang menjelaskan kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana yang berarti kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana, dalam hal ini tidak terjadi kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan program dengan kemampuan organisasi, karena organisasi belum mampu untuk menyediakan incenerator yang ideal dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Berdasarkan teori ketiga yang menjelaskan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program, dalam hal ini sasaran program yaitu partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih kecil sehingga kualitas lingkungan Kota Tegal belum meningkat sesuai yang diharapkan, dengan itu belum terjadi kesesuaian antara syarat yang diputuskan oleh organisasi.

Ketidaksesuaian antara tiga unsur pelaksanaan program belum berjalan sesuai rencana dan output yang belum sesuai harapan menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal. Diharapkan di waktu yang akan datang Diskimtaru dapat serius dalam menjalankan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal ditunjukkan dengan datang secara berkala di setiap TPST untuk meng-kroscek apa saja kendala dan kekurangan yang dihadapi. perlengkapan yang masih diletakan di beberapa rumah masyarakat sehingga terpecah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penilaian program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal memperoleh angka 71%, angka ini menunjukkan bahwa program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal termasuk kategori cukup berhasil. Cukup berhasilnya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal diperoleh dengan menghitung nilai capaian kinerja tiap kegiatan dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal tersebut. Nilai capaian kinerja kegiatan – kegiatan dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan memperoleh nilai capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 83% Nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan berhasil. Indikator *input* yang terdiri dari dana dan waktu yang dibutuhkan memperoleh penilaian yang sangat memadai. Indikator *output* yaitu menyediakan prasarana dan sarana persampahan dan kegiatan dari perencanaan penyediaan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan realisasinya, sehingga memperoleh penilaian yang sesuai. Indikator *outcome* yaitu peningkatan kapasitas pelayanan persampahan memperoleh penilaian yang baik karena pelayanan persampahan yang mengalami peningkatan. Indikator *benefit* yaitu menjadikan TPS yang berada di lingkungan masyarakat kosong karena sampah yang terangkut sesuai dengan jadwalnya dengan begitu penilaian yang diperoleh baik. Indikator *impact* yaitu meningkatkan kualitas kebersihan ditunjukkan dengan sebagian TPST yang dapat mengelola sampah sampai habis selebihnya hanya menghabiskan sampah setengahnya oleh karena itu indikator ini mendapat penilaian cukup, dari dampak yang cukup kegiatan ini dikategorikan kurang berhasil.
2. Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

memperoleh nilai capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 75%. Nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan cukup berhasil. Indikator *input* yang terdiri dari dana dan waktu yang dibutuhkan memperoleh penilaian yang sangat memadai. Indikator *output* yaitu memelihara prasarana dan sarana persampahan dan kegiatan ini sesuai dengan realisasinya, sehingga memperoleh penilaian yang sesuai. Indikator *outcome* yaitu meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dengan peralatan kebersihan yang bertahan lama dapat meningkatkan kinerja pengelola sampah sehingga kegiatan ini mendapat penilaian yang baik. Indikator *benefit* yaitu membuat kinerja pengelola sampah meningkat sehingga dapat mengurangi sedikit dari jumlah timbunan sampah banyak, kegiatan ini masih mendapat nilai yang kurang baik. Indikator *impact* yaitu dengan peralatan kebersihan yang bertahan lama dapat menunjang tugas pengelola sampah yang ditunjukkan dengan jumlah sampah yang terangkut, oleh karena itu indikator *impact* mendapat penilaian baik, dari dampak yang baik kegiatan ini dikategorikan berhasil.

3. Kegiatan pengembangan teknologi pengolahan sampah memperoleh nilai capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 57%. Nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan teknologi pengolahan sampah kurang berhasil. Indikator *input* yang terdiri dari dana dan waktu yang dibutuhkan memperoleh penilaian yang cukup, karena dana yang terserap hanya 60%. Indikator *output* yaitu tersedianya TPST dan *incenerator* yang diharapkan dapat mengelola sampah 27m³ namun realisasinya hanya 13,5m³. Indikator *outcome* yaitu tertampungnya sampah yang masuk ke TPST sehingga kegiatan ini mendapat penilaian yang cukup karena hanya dapat menampung setengah dari 27m³. Indikator *benefit* yaitu terolahnya sampah di Kota Tegal sehingga dapat mengurangi sedikit jumlah timbunan sampah, namun kegiatan ini masih mendapat

nilai yang kurang baik, karena sampah yang terolah masih 64%. Indikator *impact* yaitu peningkatan kualitas lingkungan Kota Tegal yang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, oleh karena itu indikator ini mendapat penilaian tidak baik, dari dampak yang baik kegiatan ini dikategorikan belum berhasil.

4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal, yaitu:
 1. Sebagian TPST tidak memiliki prasarana dan sarana yang lengkap untuk mengelola sampah sehingga dalam pengelolaan sampah hanya menggunakan prasarana dan sarana seadanya.
 2. *Incenerator* dengan jumlah terbatas dan tidak memenuhi persyaratan ideal membuat masalah baru dalam pengelolaan sampah yaitu tidak dapat menghabiskan sampah yang masuk ke TPST sehingga menambah jumlah timbunan sampah yang ada.
 3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tegal, karena pada dasarnya pengelolaan sampah akan berhasil jika pelaksana program dan masyarakat saling bekerjasama mewujudkan tujuan dan sasaran program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Tegal, namun dalam hal ini kesadaran masyarakat di Kota Tegal sangat kecil sehingga program belum dapat berjalan sesuai harapan.

B. Saran

Saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan prasarana dan sarana (keranjang bambu, sapu lidi, cangkul, masker, kaus tangan, sekop, sepatu boot, *incenerator*) di TPST seharusnya diperhatikan sehingga TPST dapat memaksimalkan kinerja dalam pengelolaan sampah sehingga berimplikasi pada pengurangan jumlah timbunan sampah dengan cara pengadaan prasarana dan sarana seharusnya dipercepat dan disederhanakan.
2. Sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan selama ini masih kurang perlu diidentifikasi

dengan cara mencari informasi kendala dan kekurangannya di lapangan, sehingga dapat membantu mencari solusi bersama.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi pengelolaan persampahan secara berkala di setiap kecamatan atau kelurahan dengan sasaran camat, lurah, ketua Karang Taruna dan ketua PKK. Mereka diharapkan dapat mensosialisasikan ke masyarakat langsung, selain itu bank sampah yang masih kurang perlu ditambah dan diaktifkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta

Creswell, Jhon W. 2014. *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Hadi, Samsul; Mutrofin. 2005. *Pengantar Metode Riset Evaluasi untuk kebijakan, program, proyek*. Kalam Semesta: Yogyakarta.

Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Nogi S. Tangkisilan, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Grassindo: Jakarta.

ong, Herbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung.

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Arr-ruz Media: Yogyakarta.

Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Kanisius: Yogyakarta

Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia: Jakarta.

Subarsono, A.G. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.

Syafie Kencana, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta: Jakarta.

T. Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Administrasi Publik*. Gava media : Yogyakarta.

Wirawan. 2011. *Evaluasi teori, model, standar, aplikasi dan profesi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Pengembangan kegiatan dan indikator kinerja : Lembaga Administrasi Negara Pusdiklat Sespanas Bidang TMKP.

Pelatihan evaluasi kinerja proyek pembangunan : Biro Pemantauan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 1998.

Pelatihan evaluasi kinerja proyek – proyek SPL – INPL : LPEM FEUI – Bappenas.

Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik

A study of facility management strategy: the case of commercial banks in Thailand. Journal of Facilities Management Vol. 9 No. 4, 2011

Ana Claudia Machado Padilha, Elaine Pandolfo Brustolin, Juliana Birkan Azevedo & Paloma de Mattos, Fagundes. 2015. *Sustainable Awareness: Strategic Plan of Waste Management for a Brazilian Company*. Public Administration Research; Vol. 4, No. 1; 2015

Leigh green Nancey, Stiffel Bruce, Bras Bert, P. French Steven, Yang Jiawen. 2011. *Challenges of sustainable urban planning: the case of municipal solid waste management*. Jurnal proquest. Hal 15-17

Proactive environmental management and performance by a controlling family. Management Research Review nVol. 37 No. 3, 2014 pp. 210-240

Public sector strategic planning: is it really planning or is it really strategy or is it neither or both? Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland University College, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Management 2006.

Strategies for School Environmental Management in Nigerian Secondary Schools: A Case of Calabar, Nigeria. International Education Studies Vol. 3, No. 1 February 2010

The Impact of Human Resource Management Practices, Organisational Culture,

Organisational Innovation and Knowledge Management on Organisational Performance in Large Saudi Organisations: Structural Equation Modeling With Conceptual Framework. International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 22; 2013

Evaluasi Kinerja Program Kejar Paket C Sanggar Kegiatan Belajar Kota Semarang. 2008. RA Dwi Putri Aniyanti YS. Universitas Diponegoro

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit (Studi Manajemen Strategik pada Dinas Propinsi Jawa Timur). Dewie Tri Wijayati. Universitas Negeri Surabaya

(<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2741>, di akses 2 Oktober 2015)

(<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/15/063397147/indonesia-hasilkan-625-juta-liter-sampah-sehari>, di akses 3 Oktober 2015).

(<http://www.menlh.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih-2020/>, di akses 3 Oktober 2015)

(<http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-plastik/>, di akses 3 Oktober 2015)

(<http://www.radarpekalongan.com/24463/desak-tpa-sampah-ditutup/>, diakses pada 5 Oktober 2015).

(https://www.academia.edu/3586296/Pengelolaan_Sampah_Kota, diakses 3 Oktober 2015)

Sumber Dokumen :

Renstra Diskimtaru tahun 2014 – 2019

Masterplan persampahan tahun 2015